

PERAN NU DAN MUHAMMADIYAH DALAM DIPLOMASI PUBLIK

DI ERA PRESIDEN JOKO WIDODO (2014-2019)

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

ULYA EMA FAHIMA

19323024

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

PERAN NU DAN MUHAMMADIYAH DALAM DIPLOMASI PUBLIK

DI ERA PRESIDEN JOKO WIDODO (2014-2019)

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

ULYA EMA FAHIMA

19323024

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN NU DAN MUHAMMADIYAH DALAM DIPLOMASI PUBLIK

DI ERA PRESIDEN JOKO WIDODO (2014-2019)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Hasbi Aswar, S.IP ., M.A., Ph.D
- 2 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 3 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Nama : Ulya Ema Fahima
No. Mahasiswa : 19323024
Dosen Pembimbing : Hasbi Aswar, S.I.P., M.A, Ph.D.
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : PERAN NU DAN MUHAMMADIYAH DALAM
DIPLOMASI PUBLIK DI ERA PRESIDEN JOKO
WIDODO (2014-2019).

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 14 April 2025



Ulya Ema Fahima

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian	14
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	14
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	15
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	15
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	15
1.9 Sistematika Pembahasan	16
BAB 2	16
2.1. Pandangan dan Perjalanan NU dalam Diplomasi Publik	17
2.2 Pandangan dan Perjalanan Muhammadiyah dalam Diplomasi Publik	26

BAB 3	31
3.1. Peran NU dalam Diplomasi Publik Tahun 2014-2019	32
3.1.1 Membentuk Narasi	33
3.1.2 Memperluas dan Memperkuat Kepercayaan Masyarakat	36
3.1.3 Memerangi Ekstremisme dan Kekerasan	38
3.2 Peran Muhammadiyah dalam Diplomasi Publik Tahun 2014-2019	39
3.2.1 Membentuk Narasi	39
3.2.2 Strategi Muhammadiyah Memperluas dan Memperkuat Kepercayaan Masyarakat	41
3.2.3 Strategi Muhammadiyah Memerangi Ekstremisme dan Kekerasan	42
3.3 Perbandingan Peran NU dan Muhammadiyah dalam Diplomasi Publik	44
BAB 4	46
4.1. Kesimpulan	46
4.2 Rekomendasi	48
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR SINGKATAN

- NU : Nahdhatul Ulama
- ICIS : *International Conference on Islamic Scholar*
- ISOMIL : *International Summit of Moderate Islamic Leaders*
- ISIS : *Islamic State Iraq Suriah*
- PBNU : Pengurus Besar Nahdhatul Ulama
- WCRP : *World Conference On Religion for Peace*
- WPF : *World Peace Forum*
- ACRP : *Asian Conference of Religious for Peace*
- NGO : *Non-Governmental Organization*
- LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
- HAM : Hak Asasi Manusia
- WTC : *World Trade Center*
- PCINU : Pengurus Cabang Istimewa Nahdhatul Ulama
- OKI : Organisasi Kerjasama Islam
- PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Kemlu : Kementerian Luar Negeri
- PCIM : Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah
- PTMA : Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah
- NUA : Nahdhatul Ulama Afghanistan
- ASWAJA: *Ahlussunnah Wal Jamaah*
- PWNU : Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama
- JATMAN: *Jam'iyah Ahlith Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyah*
- MDMC : Muhammadiyah Disaster and Management Center

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam diplomasi publik Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo periode (2014-2019). Rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana kedua organisasi tersebut berkontribusi dalam diplomasi publik Indonesia selama periode tersebut. Sementara itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami strategi dan peran kedua organisasi dalam membangun citra Islam moderat serta mendukung kepentingan diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen, jurnal, serta laporan resmi yang relevan. Data dianalisis menggunakan konsep strategi diplomasi publik dalam mempromosikan kebebasan beragama menurut Liora Danan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU dan Muhammadiyah memiliki peran signifikan dalam diplomasi publik Indonesia. NU lebih berfokus pada penyebaran gagasan Islam moderat melalui konferensi dan dialog internasional seperti *International Conference of Islamic Scholars (ICIS)* dan *International Summit of Moderate Islamic Leaders (ISOMIL)*. Sementara itu, Muhammadiyah lebih banyak terlibat dalam aksi nyata melalui bantuan kemanusiaan, pemberian beasiswa pendidikan, serta pembangunan infrastruktur di wilayah konflik seperti di Myanmar dan Bangladesh. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa keduanya berkontribusi dalam membangun citra Islam Indonesia yang moderat dan damai, sekaligus memperkuat *soft-power diplomacy* Indonesia di dunia internasional.

Kata-kata kunci: Diplomasi publik, NU, Muhammadiyah, Islam moderat, Joko Widodo, *soft power*.

ABSTRACT

This study discusses the role of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah in Indonesian public diplomacy during the era of President Joko Widodo's administration (2014-2019). The formulation of the problem raised is how the two organizations contributed to Indonesian public diplomacy during that period. Meanwhile, the purpose of this study is to understand the strategies and roles of the two organizations in building the image of moderate Islam and supporting Indonesia's diplomatic interests at the international level. This study uses a qualitative method with a literature study approach, namely by reviewing various relevant documents, journals, and official reports. The data were analyzed using the concept of public diplomacy strategy in promoting religious freedom according to Liora Danan. The results of the study show that NU and Muhammadiyah have a significant role in Indonesian public diplomacy. NU focuses more on spreading moderate Islamic ideas through international conferences and dialogues such as the *International Conference of Islamic Scholars (ICIS)* and the *International Summit of Moderate Islamic Leaders (ISOMIL)*. Meanwhile, Muhammadiyah is more involved in real action through humanitarian aid, providing educational scholarships, and building infrastructure in conflict areas such as Myanmar and Bangladesh. The activity shows that both contribute to building the image of moderate and peaceful Indonesian Islam, while strengthening Indonesia's soft-power diplomacy in the international world.

Keywords: Public diplomacy, NU, Muhammadiyah, moderate Islam, Joko Widodo, *soft power*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam tradisi hubungan internasional, interaksi antar negara sangat ditentukan oleh model interaksi yang diambil oleh setiap negara, dan salah satunya adalah diplomasi. Diplomasi menurut Bull (1977) adalah pelaksanaan hubungan antar negara serta entitas lainnya dalam politik internasional oleh agensi resmi dengan cara damai. Diplomasi juga diartikan sebagai cara untuk meraih kepentingan nasional suatu negara. Dalam hubungan internasional, aktor yang berperan dalam diplomasi didominasi oleh aktor negara, namun setelah berakhirnya perang dingin pada tahun 1989, komunitas internasional menyatakan bahwa dalam menciptakan perdamaian dunia, diplomasi dapat juga dilakukan oleh aktor selain negara (*non-state actor*) seperti, organisasi, individu, dan lain sebagainya (Mujiono and Alexandra 2019).

Untuk menciptakan perdamaian antar negara, para aktor hubungan internasional harus melakukan diplomasi melalui berbagai macam jalur. Sebelumnya, jalur yang lebih sering digunakan adalah jalur pertama (*track one*). Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya aktor dalam hubungan internasional, maka jalur satu yaitu diplomasi yang dilakukan oleh negara (*state*) atau pemerintah dinilai kurang efektif, maka muncullah jalur atau *track* lain yang kemudian disebut dengan *Multi-track Diplomacy* (Mujiono and Alexandra 2019).

The Institute for Multi-track Diplomacy menjelaskan ada sembilan jalur atau *track*, yang salah satunya adalah jalur keyakinan atau lebih dikenal dengan *Religion, or Peacemaking through Faith in action*, yaitu jalur tujuh. Secara historis,

isu mengenai keyakinan atau agama memang tidak terlalu menjadi perhatian dalam hubungan internasional, namun setelah banyaknya peristiwa yang berkaitan dengan agama, maka isu keyakinan ini menjadi isu krusial dan lebih sering dibahas dalam hubungan internasional (McDonald 2012).

Salah satu agama yang sering menjadi pembahasan di dunia adalah agama Islam. Agama Islam ini menjadi agama yang besar di Negara Indonesia, maka Indonesia juga menjadi negara demokrasi dengan penduduk muslim yang majemuk dan moderat terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki *soft power* yang potensial yang sekaligus menjadi tanggung jawab bagi Indonesia. Menjadi tanggung jawab artinya, dengan kekuatan yang dimiliki, Indonesia bertanggung jawab untuk dapat menjadi penengah dan fasilitator dalam mewujudkan perdamaian di dunia (Pujayanti and Dari 2018). *Soft power* yang dimiliki mendorong Indonesia menjadi negara yang cukup peka terhadap peluang penerapan keyakinan sebagai instrumen diplomasi yang efisien. Hal ini kemudian dibuktikan dengan partisipasi Indonesia dalam kegiatan berbasis agama dengan menjalankan diplomasi publik salah satunya berbentuk *Interfaith Dialogue*.

Indonesia secara berkelanjutan menampilkan wajah Islam moderat yang kemudian disebut *Islam Wasathiyah* dalam berbagai *event* dan urusan internasional, utamanya pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bahkan konsep *Islam Wasathiyah* ini digunakan oleh Presiden Joko Widodo sebagai instrumen diplomasi yang dianggap tepat dalam membantu penyelesaian konflik di Afghanistan, sebab konsep ini menekankan pada nilai perdamaian dan toleransi. Dalam melaksanakan agenda-agenda diplomasinya, Indonesia memang sangat menekankan nilai perdamaian dan toleransi. Hal ini dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu faktor dalam negeri dan faktor luar negeri. Faktor dalam

negeri yaitu, adanya ancaman ekstremis dan fundamentalis yang hendak mengubah negara Indonesia menjadi negara Islam (*khilafah*), dan faktor dari luar yaitu Indonesia menghadapi ancaman dari ISIS (*Islamic State Iraq Suriah*) serta beberapa negara yang menjadi peta persebarannya, yang mulai memasuki Indonesia. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, memunculkan gagasan bagi Presiden Joko Widodo untuk menggandeng organisasi-organisasi besar Islam moderat di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan NU (Nahdhatul Ulama) untuk menjadi mitra pemerintah dalam berbagai agenda nasional maupun internasional (Ferdiyan 2021).

Selanjutnya, Indonesia di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode pertama (2014-2019), bersama dengan Kementerian Luar Negeri mengembangkan diplomasi publik yang berbasis agama yaitu “*Interfaith Dialogue*” yang bertujuan untuk memperbaiki citra negara setelah mencuatnya isu terorisme berkedok agama. Program ini adalah program yang sangat penting sebab menjadi salah satu inovasi diplomasi publik yang juga memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa saling pengertian antar agama yang melibatkan berbagai aktor seperti NGO, pemimpin agama, media, dan juga pemuda baik di dalam maupun luar negeri (tabloiddiplomasi.org, 2018).

Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo melibatkan NU dan Muhammadiyah untuk turut serta menjalankan *soft power*-nya dan melancarkan *Interfaith Dialogue*. *Interfaith Dialogue* ini menjadi instrumen diplomasi publik Indonesia sehingga dapat mempengaruhi masyarakat internasional dan membentuk citra positif pada Islam Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Douglas Johnston dalam karyanya “*Faith-*

Based Diplomacy: Trumping Realpolitik” (2003) bahwa agama memiliki peran positif yang berpengaruh dalam meminimalisir konflik, mampu membuat perubahan yang adil dan demokratis (Hiyyat 2021). Jadi, adanya organisasi agama yang turut serta membantu pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia ini menjadi langkah yang sangat baik bagi Indonesia dan masa depan dunia. Di Indonesia, organisasi agama yang dikenal dan memiliki andil dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama bagi masyarakat Islam adalah NU dan Muhammadiyah. Tradisi-tradisi dan ajaran dalam NU menjadikannya sebagai organisasi moderat dan toleran di Indonesia, terlebih dengan lahirnya gagasan “Islam Nusantara”. “Islam Nusantara” ini secara umum merupakan sebuah gagasan yang dipahami sebagai corak Islam Indonesia yang menonjolkan pentingnya menjaga budaya lokal, kemajemukan agama, toleransi, moderatisme agama, serta perdamaian di antara sesama manusia. Konsep “Islam Nusantara” ini mulai dikenal oleh masyarakat luas ketika menjadi tema dalam Muktamar NU ke- 33 di Jombang, Jawa Timur, pada tahun 2015 yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siradj (Ferdiyan 2021). Begitu juga dengan Muhammadiyah, organisasi ini juga menunjukkan gagasan yang dinamakan “Islam Berkemajuan”. Maksud “Islam Berkemajuan” ini adalah, komitmen Muhammadiyah untuk senantiasa memajukan pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan di samping memegang teguh keislaman. Konsep ini disuarakan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, yang disampaikan oleh Din Syamsudin. Menurutnya, konsep “Islam Berkemajuan” ini sejalan dengan cita-cita Indonesia yaitu “memajukan kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Peran NU dalam diplomasi Indonesia sudah dimulai sejak kemunculannya sebagai organisasi, yaitu adanya Komite Hijaz, yang mana Komite Hijaz ini adalah upaya NU untuk mengirimkan perwakilannya untuk bertemu dengan penguasa Hijaz (Arab Saudi). Perwakilan dari NU tersebut bermaksud untuk menyampaikan gagasan NU dalam menghentikan tindakan kaum Wahabi yang menindas golongan *Ahlussunnah Wal Jamaah*. Peran NU lainnya juga tercermin dalam keaktifannya dalam beberapa konferensi seperti *World Conference On Religion for Peace* (WCRP), *International Summit of the Moderate Islamic Leader* (ISOMIL) dan *event* internasional lainnya (Faizin 2020).

Peran Muhammadiyah pun begitu banyak dalam sejarah diplomasi Indonesia, bahkan sejak pendiriannya oleh KH. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah telah menjalin persahabatan dengan negara di Timur Tengah. Kemudian, aktivitas diplomasi Muhammadiyah berkembang pesat ketika dipimpin oleh Prof. Din Syamsudin. Muhammadiyah juga memprakarsai kegiatan internasional yaitu WPF (*World Peace Forum*), dan ikut serta dalam *Asian Conference of Religious for Peace* (ACRP) pada tahun 2008.

Dari pemaparan di atas, penulis berasumsi bahwa kedua organisasi yaitu NU dan Muhammadiyah memiliki peran signifikan dalam diplomasi, terutama diplomasi publik Indonesia dan keduanya memiliki strategi dalam diplomasi publik masing-masing. Oleh karena itu penulis bermaksud menemukan dan mengetahui perbandingan dari kedua organisasi, bagaimana keduanya memainkan peran diplomasi bagi Indonesia, serta bagaimana strateginya dalam membangun diplomasi publik spesifik pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama yaitu tahun 2014 hingga tahun 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis berusaha melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu “Bagaimana peran NU dan Muhammadiyah dalam diplomasi publik pada era Presiden Joko Widodo pada tahun 2014-2019?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran peran NU dan Muhammadiyah dalam diplomasi publik pada era Presiden Joko Widodo pada tahun 2014-2019.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini membahas peran NU dan Muhammadiyah dalam diplomasi publik, namun akan terbatas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu periode 2014-2019. Saya memilih NU menjadi subjek dalam penelitian ini sebab NU merupakan organisasi Islam di Indonesia yang memiliki nilai Islam yang moderat dan berkebangsaan, hal inilah yang kemudian diakomodir sebagai “Islam Nusantara”. Kemudian, Muhammadiyah juga merupakan organisasi Islam di Indonesia yang juga memiliki nilai islam moderat dan *islam rahmatan lil alamin*. Muhammadiyah juga berfokus pada berbagai aspek kehidupan terutama pendidikan, kesehatan, dan budaya.

Diplomasi publik Indonesia oleh organisasi Islam besar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah ini didasari atas kondisi global yang konfliktual, penuh kekerasan agama, dan benturan peradaban. Maka dari itu, NU dan Muhammadiyah hadir menjadi aktor diplomasi publik dan mengupayakan berbagai narasi perdamaian dan dialog lintas agama. Pemerintahan Joko Widodo juga memilih NU dan Muhammadiyah sebagai aktor diplomasi publik karena NU

dan Muhammadiyah ini memiliki massa yang besar di Indonesia, sehingga hal ini dapat membantu menyukseskan diplomasi Pemerintah Indonesia.

Alasan penulis untuk memberikan batasan waktu 2014-2019 yaitu karena rezim Presiden Jokowi periode pertama bermula pada tahun 2014 dan berakhir 2019. Pada periode tersebut hubungan pemerintah dengan organisasi masyarakat sangat dekat. Terutama dengan organisasi Islam yang memiliki basis masa yang besar yaitu NU dan Muhammadiyah. Hubungan dekat antara pemerintah dengan NU dan Muhammadiyah ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan persatuan bangsa, mengimplementasikan kebijakan, dan menciptakan stabilitas bangsa. Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga memiliki kepentingan untuk mencitrakan Indonesia sebagai negara yang moderat, toleran, dan damai di kancah internasional. Selain itu, pada periode tersebut kedua organisasi saling berlomba mencari celah untuk berkontribusi dalam diplomasi publik Indonesia dan pemerintah pada masa tersebut juga mendukung konsep yang dibawa oleh kedua organisasi. Selain itu, rezim Joko Widodo kala itu juga cenderung memilih aktor non-pemerintah atau *non-state actor* untuk menjadi penjaga ideologi Muslim Indonesia agar selalu selaras dengan ideologi bangsa Indonesia.

Alasan lainnya adalah, pada tahun sebelumnya meskipun gagasan-gagasan “Islam moderat” sudah sering terdengar, namun promosi dan pelabelan tersebut sering kali lebih dimanfaatkan rezim atau pemerintah pada zaman itu untuk fokus pada urusan dalam negeri dan hanya terbatas untuk mengamankan kepentingan politik mereka yang sempit. Selanjutnya, presiden yang berkuasa pada zaman itu yaitu Presiden SBY mengaitkan peran baru Islam ke dalam kebijakan luar negeri

Indonesia karena ambisi politiknya, yaitu SBY ingin dianggap sebagai seorang negarawan yang menjunjung toleransi beragama. Atas dasar itulah penulis membatasi periode penelitian yaitu tahun 2014 hingga 2019.

Penulis memilih dua aktor yaitu NU dan Muhammadiyah sebab kedua organisasi memiliki nilai yang hampir selaras namun berbeda, seperti narasi “Islam Nusantara” yang digagas NU dan “Islam Berkemajuan” yang digagas Muhammadiyah. Keduanya menarik untuk dikaji dan berkontribusi pada pembentukan narasi dalam diplomasi publik Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua subjek sebab penulis hendak meneliti perbedaan atau perbandingan dari keduanya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah peran organisasi Islam di Indonesia yaitu Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam diplomasi publik, maka dari itu penulis akan mencoba menggunakan beberapa tulisan terdahulu yang membahas mengenai peran NU dan Muhammadiyah dalam diplomasi. Beberapa tulisan yang ditemukan hanya membahas peran NU maupun Muhammadiyah tersendiri terkait diplomasinya di kancah internasional. Tulisan pertama berjudul *Religion and Public Diplomacy: The Role of Nahdhatul Ulama (NU) in Indonesia - Afghanistan Peace Agenda*, oleh Emharis Gigih Pratama (2021). Tulisan ini berfokus pada analisis peran Nahdhatul Ulama (NU) dalam menyukseskan diplomasi publik Indonesia melalui perdamaian Afghanistan. Tulisan ini juga berfokus pada alasan mengapa NU lebih diunggulkan daripada organisasi moderat lainnya di Indonesia. Hasil dari tulisan adalah ada tiga peran penting Nahdhatul Ulama yaitu, pertama NU sebagai aktor

yang kredibel dalam bidang *Islam Wasathiyah*, kedua NU sebagai mitra kerja sama strategis pemerintah, dan ketiga, NU memiliki peran diplomasi publik dengan menginisiasi program independen untuk Afghanistan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah, penelitian ini akan mengomparasikan antara peran NU dan Muhammadiyah (Ferdiyan 2021). Kemudian, dalam tulisan berjudul *Organisasi Keagamaan dan Keamanan Internasional: Beberapa Prinsip dan Praktik Diplomasi Nahdhatul Ulama (NU) Indonesia*, oleh Andi Purwono (2013) mengelaborasi upaya-upaya diplomatik yang dilancarkan oleh Nahdhatul Ulama, yang mana merupakan organisasi yang memiliki pengaruh besar di Indonesia, serta menjelaskan kontribusinya dalam mewujudkan perdamaian dunia baik dalam tataran prinsip maupun praktik. Tulisan ini menemukan bahwa partisipasi diplomasi yang dilakukan oleh kelompok keagamaan semakin nyata terlihat, dan beberapa praktik diplomasi yang dilakukan banyak mengenai penguraian konflik internasional, sehingga ini kemudian harus menjadi perhatian bagi Indonesia untuk menjaga keberlanjutannya. Tulisan ini hanya berfokus pada prinsip dan praktik diplomasi NU, sehingga akan berbeda dengan penelitian yang akan dibahas, yang mengomparasikan dengan Muhammadiyah dan fokus pada era Presiden Joko Widodo (Purwono 2020).

Selanjutnya, dalam tulisan Hafiz Nur Hiyyat yang berjudul *soft power Diplomacy Indonesia melalui Muhammadiyah* (2021), menjelaskan mengenai *soft power diplomacy* Indonesia melalui pengembangan pendidikan dan kebudayaan di luar negeri dan menggunakan studi kasus yaitu Isu Rohingya: *Indonesia-Myanmar Diplomacy*. Teori yang digunakan adalah teori *soft power diplomacy*, dan metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Temuan dalam penelitian ini yaitu bahwa dalam kasus Rohingya, Indonesia membuka pintu diplomasi publik dan

melakukan pendekatan kultural kepada Myanmar (Hiyyat 2021).

Kemudian, tulisan keempat oleh Andi Purwono berjudul *Diplomasi Kiai Nahdhatul Ulama Melalui Konferensi Ulama Internasional* (2020) menjelaskan mengenai alasan adanya konferensi dan kontribusi NU dalam diplomasi. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan studi literatur. Temuan dari tulisan ini yaitu bahwa *Islam Rahmatan lil alamin* yang menjadi dasar adanya konferensi tersebut dan konferensi ini memberikan kontribusi positif dalam membentuk komunitas epistemic, jaringan, dan membentuk citra Islam dalam hubungan dengan dunia barat (Purwono 2020).

Tulisan kelima berjudul *Peran Muhammadiyah dalam Membangun Peradaban di Dunia*, oleh Abdullah Masmuh (2020). Dalam tulisannya, ia menjelaskan terkait spirit peradaban Muhammadiyah dan peran Muhammadiyah dalam membangun peradaban di dunia. Masmuh juga menjelaskan mengenai etika Muhammadiyah yang sangat dijunjung tinggi dan bagaimana konstruk peradaban yang digunakan oleh Muhammadiyah. Tulisan ini menjelaskan terkait peradaban yang kemudian diperkuat dengan peran-peran Muhammadiyah dalam mewujudkan peradaban di dunia. Tulisan ini berbeda dengan penelitian yang akan dibahas, yang mana tulisan ini hanya berfokus pada peran Muhammadiyah saja (Abdullah Masmuh 2020).

Pembahasan literatur-literatur di atas hanya membahas mengenai peran NU maupun Muhammadiyah tersendiri dalam dunia internasional, belum menyinggung perbandingan keduanya dan belum spesifik waktu atau periodenya. Sehingga sangat penting bagi penulis dalam penelitian ini untuk membahas bagaimana peran NU dan Muhammadiyah dalam diplomasi publik pada masa presiden Joko Widodo (2014-2019), sebab literatur-literatur yang ada belum membahas perbandingan

peran kedua organisasi dalam masa presiden Joko Widodo. Maka dari itu, penelitian ini juga akan menggali lebih dalam peran dan kontribusi kedua organisasi dalam ranah diplomasi publik, sebab keduanya dewasa ini menjadi aktor diplomasi bagi Indonesia yang mendapat banyak sorotan nasional maupun internasional.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam kajian hubungan internasional, aktor atau pelaku yang sering terlibat adalah negara atau pemerintah. Namun seiring berkembangnya waktu utamanya pasca perang dingin, para pakar hubungan internasional beranggapan bahwa, untuk mewujudkan perdamaian tidak harus selalu dilakukan oleh aktor negara. Namun dapat dilakukan oleh aktor non negara seperti serikat pekerja, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, maupun individu yang menjalankan kekuatannya di berbagai kasus dalam hubungan internasional (Mujiono and Alexandra 2019).

Penelitian ini menggunakan konsep milik Liora Danan yaitu “Strategi Diplomasi Publik untuk Mempromosikan Kebebasan Beragama” dalam buku yang berjudul *Shaping the Narrative of Religious Freedom* oleh Liora Danan, namun dalam konteks ini penulis akan menggunakan konsep tersebut untuk menganalisis peran-peran NU dan Muhammadiyah dalam diplomasi publik di era Joko Widodo tahun 2014-2019.

Dalam buku *Shaping the Narrative of Religious Freedom*, Danan (2013) menyatakan bahwa “*discussion about religious freedom can advance the goals of public diplomacy*”. Untuk mencapai tujuan diplomasi publik, terdapat tiga bentuk strategi yaitu membentuk narasi, memperluas dan memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memerangi ekstremisme kekerasan. Dari ketiga strategi tersebut, setiap strategi memiliki strategi praktis atau langkah-langkah yang dapat dilakukan.

A. Membentuk Narasi

1. Melibatkan suara-suara tak terduga dan kredibel dalam mempromosikan moderasi beragama. Dalam strategi ini, pemerintah dapat menyelenggarakan dialog mengenai moderasi beragama dan isu-isu terkait. Pemerintah dapat bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

2. Menggunakan media kreatif untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan terhadap isu moderasi beragama. Untuk mencapai *goal* diplomasi publik, aktor diplomasi dapat memanfaatkan media kreatif melalui acara televisi, film, berkolaborasi dengan perusahaan swasta atau sekolah bisnis. Melalui ini, aktor dapat menghasilkan pemasaran sosial atau iklan yang bersifat membantu atau menyuarakan isu-isu kelompok minoritas dan aktor juga dapat menyelenggarakan pelatihan media bagi jurnalis lokal terkait isu-isu yang relevan seperti gender, imigrasi, dan supremasi hukum. Kolaborasi antara kelompok agama dengan perusahaan swasta atau sekolah dapat menghasilkan pemasaran sosial serta dapat menyuarakan isu-isu kelompok minoritas atau memanusiakan kelompok yang teraniaya.

3. Meningkatkan ketersediaan informasi terkait kebebasan beragama. Dalam strategi ini, pemerintah harus mendukung media baik *offline* maupun *online*, serta mempublikasikan penelitian hukum, ekonomi, atau buku-buku yang berkaitan dengan kebebasan beragama. (Danan, 2013)

B. Memperluas dan Memperkuat Kepercayaan Masyarakat

1. Mengintegrasikan isu kebebasan beragama ke dalam program kunjungan dan pertukaran tradisional. Dalam strategi ini, pemerintah dapat mengintegrasikan isu-isu kebebasan beragama yang relevan dengan keadaan lokal ke dalam pertukaran pendidikan, profesi, budaya, seminar, dan dialog publik. Pertukaran ini

dapat melibatkan berbagai kalangan seperti pemimpin agama, ekonom, ilmuwan politik, sarjana hukum, pengacara, hakim, pembela hak asasi manusia, jurnalis, pemimpin budaya, serta pejabat pemerintah dan keamanan. Program ini akan memberikan beasiswa bagi mahasiswa, cendekiawan agama/ulama, untuk mengikuti program di luar negaranya kemudian akan kembali ke negaranya untuk membangun sistem yang lebih baik di negaranya.

2. Menghubungkan masyarakat dari berbagai latar belakang agama melalui multimedia. Dalam strategi ini, pemerintah harus mempertimbangkan cara-cara untuk menggunakan multimedia dan jejaring sosial untuk menghubungkan para aktivis, dan menghubungkan orang-orang dengan latar belakang berbeda baik nasional, regional, maupun internasional dalam berbagai isu termasuk isu kebebasan beragama. Jejaring sosial seperti *facebook*, *youtube* dapat digunakan, misalnya untuk menghubungkan pendeta, pendidik, pengacara, atau mengadakan konferensi video untuk menyelenggarakan seminar/diskusi terkait ruang publik, imigrasi, kebijakan luar negeri, dan hak asasi manusia. (Danan, 2013)

C. Memerangi Ekstremisme

Jadi, konsep Liora Danan ini akan digunakan untuk membahas upaya NU dan Muhammadiyah dalam menyebarkan gagasan moderasi beragama melalui diplomasi publik di era pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode 2014-2019.

1.7 Argumen Sementara

Penelitian ini menganalisis kegiatan diplomasi publik NU dan Muhammadiyah pada periode Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019 menggunakan konsep diplomasi publik milik Liora Danan yaitu "strategi diplomasi publik dalam mempromosikan kebebasan beragama", yang mana dalam konsep ini

terdapat tiga langkah yaitu membentuk narasi, yaitu peran-peran yang dilakukan kedua organisasi dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap NU dan Muhammadiyah. Contohnya adalah diadakannya konferensi ulama internasional oleh NU dan diadakannya pertemuan ulama juga oleh Muhammadiyah.

Kedua, memperluas dan memperkuat kepercayaan masyarakat, yaitu NU dan Muhammadiyah melakukan berbagai pertemuan dan agenda-agenda untuk memperluas kepercayaan masyarakat. Contohnya yaitu, diadakannya ISOMIL (*International Summit of Moderate Islamic Leader*) oleh NU, dan pemberian beasiswa kepada masyarakat di Filipina oleh Muhammadiyah. Kemudian, memerangi ekstremisme dan kekerasan, dalam langkah ketiga ini NU melawan ekstremisme melalui narasi dan solusi penyelesaian konflik dan Muhammadiyah melawan ekstremisme melalui bantuan kemanusiaan, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, argumen sementara dari penelitian ini adalah peran NU dan Muhammadiyah dalam diplomasi publik sangat banyak, dan dapat dikatakan berhasil. NU berperan dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Rohingya dan Afghanistan, serta NU juga berperan dalam forum perdamaian internasional. Muhammadiyah pun turut berperan dalam forum-forum internasional seperti konferensi dan dialog peradaban. Kedua organisasi memiliki ciri khas tersendiri pada keikutsertaannya dalam aktivitas internasional dan keduanya menjadi tangan panjang pemerintah Indonesia untuk menjadi aktor diplomasi di dunia internasional.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Metode ini dianggap merupakan metode

penelitian yang tepat untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini membahas peran NU dan Muhammadiyah dalam diplomasi publik, maka penelitian ini memuat analisis deskriptif atas data hasil studi literatur dengan menambahkan argumen penulis.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yang berjudul Peran NU dan Muhammadiyah dalam Diplomasi Publik di Era Joko Widodo (2014-2019) adalah organisasi NU, dan Muhammadiyah. Sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah diplomasi publik pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo pada tahun 2014 hingga 2019. Pada masa itu, kedua organisasi memiliki andil yang cukup banyak dalam diplomasi publik.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini, penulis akan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari berbagai dokumen yang memuat informasi tentang keterlibatan NU dan Muhammadiyah dalam diplomasi publik seperti laporan kegiatan kenegaraan yang termuat di *website* resmi Kementerian Luar Negeri RI, laporan kegiatan di kedua organisasi (NU dan Muhammadiyah), dan beberapa buku yang memuat perspektif kedua organisasi dalam diplomasi sebagaimana ditulis oleh kedua organisasi. Sementara itu, data sekunder didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan resmi, dokumen, *e-book*, artikel dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini serta dapat dipertanggungjawabkan.

1.8.4 Proses Penelitian

Pada proses penelitian, penulis mengawali dengan melakukan kajian pustaka untuk memastikan sisi kebaruan dari penelitian ini dan memastikan bahwa

belum ada penelitian yang serupa sebelumnya. Selanjutnya, penulis melakukan riset dengan mencari data-data yang akan digunakan dalam penelitian yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen, laporan resmi, atau artikel yang kredibel dan relevan. Data-data yang dikumpulkan akan menjadi bahan dalam penelitian dan untuk mendukung argumen penulis. Setelah data terkumpul, penulis akan menganalisis secara mendalam dengan tujuan menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab pertama dalam penelitian ini adalah latar belakang masalah, yang menjelaskan gambaran umum dan alasan pemilihan topik. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, argumen sementara, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi ulasan singkat perkembangan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dari awal pembentukannya hingga tahun 2019. Bab ini juga berisi peran organisasi Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dalam dunia internasional pada masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2014-2019.

Bab ketiga berisi analisis kedua organisasi yaitu Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah terkait perannya dalam diplomasi publik di dunia internasional dengan menggunakan teori dan konsep dalam ilmu Hubungan Internasional.

Bab keempat berisi penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan adalah penegasan kembali dari bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya, dan rekomendasi bertujuan untuk memberikan evaluasi hasil penelitian.

BAB 2

PERAN DAN PANDANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH

DALAM DIPLOMASI PUBLIK

2.1. Pandangan dan Perjalanan NU dalam Diplomasi Publik

Nahdhatul Ulama atau disingkat menjadi NU merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 M/ 16 Rajab 1344 (Data Indonesia, 2021). Sebagai organisasi keagamaan terbesar, Nahdhatul Ulama memiliki berbagai karakter dan gagasan di dalamnya, baik dalam bidang agama, ekonomi, sosial, maupun politik. Sejak awal pendiriannya, NU memiliki karakter atau watak global yang dinamis, yang mampu menyesuaikan nafasnya di berbagai lini kehidupan. Dimulai pada tahun 1926, NU mengawali kiprahnya dengan menyusun kepanitiaan kecil bernama Komite Hijaz yang diketuai oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah dan memiliki tugas untuk memperjuangkan kebebasan bermazhab di berbagai belahan dunia. Komite Hijaz ini dikirim ke Arab Saudi menemui Raja Ibnu Saud untuk berdiplomasi terkait keputusan Raja yang melarang mazhab berkembang di Hijaz. Menurut NU, pelarangan kebebasan bermazhab ini menjadi ancaman bagi peradaban Islam itu sendiri (Purwono 2020).

Sejak awal kelahirannya, NU memang berupaya untuk menjadi organisasi yang berkontribusi tak hanya di dalam negeri saja, namun juga bagi perkembangan dunia internasional. Hal ini menjadi jelas bahwa NU memiliki pandangan serius terhadap diplomasi dengan negara-negara internasional khususnya pada diplomasi publiknya (Purwono 2020). Pandangan NU terhadap diplomasi publik sangat jelas

tergambar dari gagasan-gagasan dan sepak terjangnya di dunia internasional. Dalam menjalankan diplomasinya pun NU memiliki prinsip-prinsip, seperti prinsip *Izzul Islam wal Muslimin* (keluhuran Islam dan kaum Muslimin) menuju *Rahmatan lil alamin* (menjadi rahmat bagi alam semesta). NU berkomitmen untuk selalu menyelaraskan setiap langkahnya dengan prinsip ini dan sesuai dengan norma ajaran Islam. Ajaran Islam yang dianut oleh NU adalah *ahlus sunnah waljamaah* atau *Sunni*, dengan beberapa nilai atau prinsip yang menjadi pedoman yakni *tawasuth* atau sikap moderat (tidak terjebak dalam hal yang bersifat ekstrem), *tasamuh* atau sikap menghargai perbedaan (toleransi), *i'tidal* atau adil, dan *tawazun* yang berarti sikap menyeimbangkan segala aspek kehidupan. Melalui prinsip-prinsip tersebut, NU mampu bergerak memperjuangkan berbagai persoalan tak hanya di dalam organisasi dan dalam negeri, namun juga di luar negeri. Menurut KH Sahal Mahfudz, NU memiliki karakter yang fleksibel dan elastis, artinya NU tidak kaku dan tidak ekstrem dalam merespon suatu permasalahan. Karakter yang dimiliki NU ini membuat NU dipandang sebagai organisasi yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan prinsip yang dimiliki menjadi inspirasi bagi agama-agama dan dunia internasional sebab selaras dengan prinsip perdamaian dunia atau *humanitarian principles*. Prinsip kemanusiaan ini juga menjadi modal bagi NU dalam menyebarkan dan memperkenalkan nilai Islam *Rahmatan lil alamin* di tataran global (Purwono 2013).

Gagasan NU dalam diplomasi publik ini sudah tidak diragukan lagi, sebab sudah banyak implementasi maupun praktik yang dilakukan sejak kelahirannya, terlebih di tahun 2014 hingga saat ini. Salah satu gagasan yang diusung NU adalah gagasan “Islam Nusantara” dan Islam moderat. Gagasan ini tidak terlepas dari

prinsip yang dimiliki NU dalam hal kemanusiaan. “Islam Nusantara” ini berarti gagasan Islam yang memiliki wajah ke-Indonesiaan atau mencitrakan karakter damai sesuai dengan nilai Islam *rahmatan lil alamin* yang merangkul seluruh makhluk Allah tak hanya yang beragama Islam saja di seluruh belahan dunia. “Islam Nusantara” ini berusaha menunjukkan Islam yang ramah, yang jauh dari ekstremisme dan radikalisme, serta lebih mendekatkan diri pada pluralisme, dibanding fundamentalisme dalam beragama. Konsep “Islam Nusantara” awal mula dicetuskan yaitu pada bulan Agustus 2015 dalam Muktamar NU ke-33 di Jombang, yang juga dijelaskan oleh KH Aqil Siradj selaku Ketua umum PBNU pada saat itu, bahwa konsep tersebut adalah corak Islam yang ramah, santun, serta berbudaya (Rohman et al. 2557).

Gagasan “Islam Nusantara” tak muncul begitu saja, gagasan ini terilhami dari nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh di Indonesia. “Islam Nusantara” sesungguhnya bukan gagasan baru yang seketika timbul begitu saja, gagasan ini sesungguhnya sudah dicontohkan oleh para ulama terdahulu seperti Walisongo, yang mana ajaran Islam menyatu dengan nilai-nilai lokal yang ada di kehidupan masyarakat setempat. Aset atau peninggalan para Wali pun masih bisa dinikmati hingga saat ini. Salah satu contohnya adalah Masjid Agung Kudus atau Masjid Menara Kudus. Masjid ini sangat jelas terlihat perpaduan antara kebudayaan Hindu serta Islamnya. Keputusan dalam membangun masjid dengan desain tersebut tentu bukan tidak ada artinya, tetapi faktor budaya, nilai kearifan, perilaku moderat terpadu menjadi satu kesatuan. Selain arsitektur masjid, “Islam Nusantara” ini juga tercermin pada praktik-praktik seperti ziarah ke makam wali atau ulama, acara perayaan tradisi lokal, dan lain sebagainya (Aji, 2022).

“Islam Nusantara” ini memiliki berbagai nilai-nilai, diantaranya adalah

nilai moderasi atau sikap tengah yang menghindari ekstremisme, nilai inklusivitas dan toleransi, nilai kearifan lokal, nilai akulturasi budaya dan agama, nilai *rahmatan lil alamin*, nilai santun dan bijaksana, penerapan fiqh yang kontekstual, nilai solidaritas dan gotong royong, dan nilai keberlanjutan islami nusantara (Nurjannah and Andi Aderus 2025).

Gagasan yang diusung NU yang disebut “Islam Nusantara” ini berhasil menarik perhatian publik dan pemerintah bahkan dalam proses integrasi dengan politik luar negeri Indonesia. Kementerian Luar Negeri RI juga menyatakan bahwa Islam moderat yang diusung NU ini menjadi Islam yang berbeda dengan corak Islam di dunia yang mana dapat menjadi modal dalam diplomasi publik dan diplomasi antar agama sehingga agama-agama dapat hidup berdampingan dengan rukun.

Ide-ide diplomasi publik NU dipraktikkan dengan berbagai kegiatan dan menggelar rangkaian *Interfaith Dialogues* yang berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia (Kementerian Luar Negeri Indonesia), beberapa metode atau strategi yang dilakukan NU adalah dengan menggelar kegiatan konferensi internasional bertemakan *Islam rahmatan lil’alamin* seperti contohnya ICIS (*International Conference of Islamic Scholars*) yang mana memiliki tujuan untuk mewadahi NU dalam menyalurkan nilai-nilai Islam moderat sebagai landasan hidup dalam kesalehan spiritual maupun sosial untuk mewujudkan dunia yang damai dan beradab, melakukan lawatan-lawatan ke negara tetangga, atau mengunjungi negara yang berkonflik untuk membantu memberikan solusi konflik yang ada melalui dialog dan negosiasi, serta mendirikan kantor cabang NU di berbagai negara. Upaya-upaya tersebut merupakan gagasan dan langkah NU dalam mempraktikkan diplomasi publik dan *faith based-diplomacy* di dunia internasional (Purwono 2020).

Pandangan Nahdhatul Ulama mengenai diplomasi publik terutama dalam diplomasi yang berbasis agama melahirkan gagasan demi gagasan bagi para aktor sejak kemunculannya, dan mulai memberikan kontribusi di Indonesia. Mengawali kontribusi NU di kancah internasional, dilakukan pada tahun 1926 oleh KH. Wahab Chasbullah yang membentuk sebuah komite atau panitia kecil yang disebut Komite Hijaz dan memiliki tujuan untuk memperjuangkan kebebasan bermazhab yang dianut oleh banyak Muslim di dunia. Komite ini mendatangi Raja Ibnu Saud yang bermukim di Arab Saudi (Hijaz) untuk berdiplomasi. Kunjungan yang dilakukan KH. Wahab Chasbullah ini menjadi pelopor kebebasan bermazhab di Makkah, sehingga umat Islam di dunia dapat menjalankan agamanya sesuai madzabnya masing-masing. Kunjungan ini menjadi kontribusi Nahdhatul Ulama dalam diplomasi publik bagi Indonesia sekaligus membuktikan bahwa ulama pesantren di Indonesia mampu berpartisipasi dalam dunia internasional serta menjadi fondasi bagi kader Nahdhatul Ulama untuk berdiplomasi di tingkat global (Wafi 2019).

Perjalanan diplomasi Nahdhatul Ulama dilanjutkan oleh salah satu sosok legendaris yaitu KH. Abdurrahman Wahid yang merupakan Ketua PBNU (Pengurus Besar Nahdhatul Ulama) pada tahun 1984-1999. Diplomasi yang dilakukan KH. Abdurrahman Wahid dilakukan jauh sebelum ia menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 1994, KH. Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur mendapatkan undangan dari Perdana Menteri Israel Yitzak Rabin untuk melihat langsung penandatanganan perdamaian Israel dan Yordania. Hal ini kemudian memunculkan gagasan Gus Dur untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel ketika ia menjabat menjadi Presiden RI, sebab ia menyadari betul bagaimana kondisi penduduk Palestina dan Gus Dur meyakini

bahwa untuk dapat berperan dalam perdamaian Palestina dan Israel, Indonesia harus menjalin diplomasi dengan keduanya (gusdurian.net, 2020).

Periode selanjutnya, NU menjadi lebih aktif di dunia internasional. Ketika Islam sedang berada di fase terpuruk, yaitu ketika terjadi tragedi tumbangnya Menara Kembar World Trade Center (WTC) pada 11 September 2001 di Amerika Serikat. Pihak AS menyebut oknum teroris Al-Qaidah yang dipimpin oleh Usamah bin Laden sebagai pelaku di balik tragedi ini. Sebab itulah ketegangan Islam dan Barat semakin memuncak, bahkan muncul berbagai pandangan negatif terhadap Islam seperti Islam penuh terorisme, kekerasan, fundamentalisme, diktator, dan tidak menghargai pluralisme. Kondisi Islam yang terpuruk seperti ini membangkitkan semangat NU untuk membela Islam dengan mengadakan tabayun atau memberikan klarifikasi terhadap tokoh-tokoh agama dunia seperti apa Islam sebenarnya dan bahwa Islam tidak dapat digeneralisasi dengan segelintir kelompok saja. Dalam kesempatan ini, NU diwakili oleh KH Hasyim Muzadi (Ketua PBNU Masa Khidmat 2000-2010) menghadiri undangan Amerika Serikat yaitu empat bulan pasca terjadinya tragedi WTC. Di AS, KH Hasyim Muzadi menjelaskan Islam yang dipraktikkan Islam di Indonesia terutama oleh NU yaitu Islam moderat dan Islam *rahmatan lil alamin* . Selain itu pada bulan Maret-April 2005, KH Hasyim Muzadi juga pergi ke Thailand pasca terjadinya pembantaian 84 Muslim di Thailand. KH Hasyim juga menjelaskan terkait Islam moderat dan Islam *rahmatan lil alamin* terhadap masyarakat Thailand yang mayoritasnya beragama Buddha dan Hindu. Selanjutnya, hal yang sama juga dilakukan KH Hasyim Muzadi, yaitu ketika berkunjung ke Tahta Suci Vatikan, di Roma Italia. Beliau menjelaskan keramahan dan penghormatan pada pluralisme yang merupakan perwujudan dari Islam *rahmatan lil alamin* di hadapan para pemimpin Katolik (Makmum 2020, 8).

NU di masa kepemimpinan KH Hasyim Muzadi lebih membuka diri untuk berkontribusi dalam kegiatan maupun persoalan dunia internasional seperti dalam penyelesaian konflik, penanggulangan terorisme, maupun dalam isu lainnya. KH Hasyim juga berupaya memperluas jaringan NU di dunia internasional dengan mulai mendirikan cabang istimewa di beberapa negara seperti Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Australia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan beberapa negara Arab serta Timur Tengah. Setelah mendirikan cabang istimewa pada tahun 2004, KH Hasyim kemudian mendirikan ICIS atau *Internasional Conference of Islamic Scholars* yang bertujuan untuk memperkuat pemikiran terkait Islam moderat *dan Islam rahmatan lil alamin*. ICIS sudah dilaksanakan beberapa kali yaitu pada tahun 2004, 2006, 2008, dan 2015. ICIS juga sudah menjadi lembaga yang diakui oleh OKI (Organisasi Kerja sama Islam), *Rabitha Alam Islami* (Liga Muslim Dunia) dan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) (Makmum 2020, 12).

Menurut KH Hasyim Muzadi, peran NU dalam diplomasi Indonesia sangatlah dibutuhkan, sebab dalam beberapa riset dan forum internasional, *Islam rahmatan lil'alam* yang diusung NU relatif lebih dapat diterima dan diakui moderasinya oleh negara-negara di dunia internasional. Peran NU dalam diplomasi juga dapat dikatakan kuat karena sejumlah diplomasi yang berhasil berkat rekomendasi NU. Misalnya, PT Pertamina ketika melobi Aljazair dan Libya untuk bekerja sama, mereka mengklaim bahwa diri mereka NU, kemudian dengan segala pertimbangannya, Pertamina pun mendapatkan dua sumur minyak di Aljazair (Makmum 2020, 15).

Selama menjadi Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi memiliki berbagai peran, baik di dalam maupun luar negeri. Kyai Hasyim selalu aktif dalam

kegiatan atau forum perdamaian dunia. Salah satu kegiatan yang didirikan Kyai Hasyim dan perlu dilanjutkan adalah *International Conference of Islamic Scholar* (ICIS). Agenda ini menjadi *second track diplomacy* yang mampu mempertemukan negara-negara yang susah untuk bertemu karena berbagai hal yang ada seperti negara di Timur Tengah dan negara Barat. Selama menjabat sebagai sekjen ICIS, KH Hasyim Muzadi pernah membela Iran atas Amerika Serikat mengenai pembuatan nuklir untuk kepentingan sipil Iran. KH Hasyim membantu menghentikan embargo Amerika Serikat kepada Iran dan upaya ini berhasil meskipun menimbulkan fitnah yaitu KH Hasyim dianggap Syiah. Dalam waktu yang hampir sama, KH Hasyim Muzadi juga aktif sebagai pengurus dalam Liga Muslim Dunia atau *Rabithah Alam Islam* yang berpusat di Makkah, Saudi Arabia. Selain itu, perjuangan KH Hasyim Muzadi dalam mempromosikan Islam moderat ke dunia internasional tercermin dalam kunjungannya ke Lebanon untuk menengahi perdebatan antara Sunni dan Syiah. ICIS bersama KH Hasyim Muzadi juga berperan dalam penyelesaian konflik di Thailand Selatan, memberikan dukungan perdamaian untuk Suriah, meredam pertikaian Sunni-Syiah di Pakistan, memperkenalkan moderasi NU ke Vatikan, membela kedaulatan Irak, melobi Australia pasca bom Bali II, memperluas Kerja sama dengan Inggris dan Jerman, mendukung kemerdekaan Palestina, mencairkan ketegangan Islam dan Barat, dan mendorong dialog lintas agama melalui PBB (Makmum 2020, 21).

Aktivitas-aktivitas NU dalam menyuarakan Islam moderat di dunia internasional di bawah pimpinan KH Hasyim Muzadi disambut baik oleh pemerintah Indonesia terutama Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Kemlu mendukung aktivitas tersebut dengan membentuk unit khusus di bawah Direktorat Diplomasi Publik. Lebih lanjut, di tengah banyaknya aktivitas internasional NU dan

banyaknya konflik Islam, Kiai Hasyim mengusulkan kepada Menlu Hasan agar menjadikan konsep Islam Moderat sebagai landasan baru politik luar negeri Indonesia. Usulan Kiai Hasyim ini diterima baik oleh Presiden Megawati dan Menlu Hasan Wirajuda, kemudian Islam Moderat pun mendapat posisi yang penting bagi Indonesia terutama dalam hubungan internasionalnya.

Salah satu agenda diplomasi publik yang kemudian dilaksanakan oleh Kemlu bersama Nahdhatul Ulama adalah *Interfaith Dialogue*, agenda ini merupakan agenda internasional sebagai upaya Indonesia untuk memperbaiki citra Islam akibat banyaknya isu terorisme berkedok agama. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat perdamaian antar negara dan meningkatkan rasa saling memahami antar agama dengan melibatkan berbagai aktor non-negara seperti NGO, pemuda, media, dan pemimpin agama. Selain tujuan, kegiatan ini memiliki manfaat yaitu menjadi *soft power* bagi Indonesia dalam hubungannya di dunia internasional. *Interfaith Dialogue* juga membuka kesempatan bagi pemimpin, pemuda dan institusi agama di Indonesia untuk memperluas jaringannya.

Kepopuleran NU dan Kiai Hasyim menyebabkan NU dikenal oleh dunia internasional, bahkan PBNU menjadi organisasi keagamaan yang paling sering dikunjungi oleh para pemimpin dunia yang ingin mengenal NU lebih dalam dan menjalin kerja sama dengan NU. Para pemimpin tersebut yaitu PM Australia Kevin Rudd, Presiden Iran Mahmod Ahmadinejad, dan sekjen Uni Eropa Javier Solana (Makmum 2020).

Setelah kepemimpinan KH Hasyim Muzadi berakhir, yaitu pada tahun 2009, tahun berikutnya PBNU dipimpin oleh KH Said Aqil Siradj. Meskipun sudah tidak menjadi ketua PBNU, namun KH Hasyim Muzadi masih tetap berkontribusi dalam diplomasi Indonesia, terutama dalam ICIS. Kemudian, perjuangan diplomasi

publik Nahdhatul Ulama dilanjutkan oleh Ketua PBNU ke sepuluh yakni Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, M.A yang memulai kiprahnya pada tahun 2010. Aqil Siradj banyak mewakili Nahdhatul Ulama dalam mendakwahkan pesan-pesan Islam *Rahmatan lil alamin* melalui berbagai konferensi internasional. Pada tanggal 18-21 Agustus 2003, ia menjadi pembicara dalam konferensi internasional dengan tema *Asia Gathering of Muslim Ulama and Christian Bishops* di Manila. Pada tanggal 23-25 Februari 2004 menjadi pembicara dalam forum *International Conference of Islamic Scholar I* di Jakarta, dan pada tanggal 19-22 Juni 2006 menjadi pembicara dalam *International Conference of Islamic Scholar II* di Jakarta (Nayiroh 2013).

2.2 Pandangan dan Perjalanan Muhammadiyah dalam Diplomasi Publik

Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan yang juga memiliki pengaruh besar di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M. Usianya yang sudah memasuki abad kedua tentunya sudah banyak kontribusi yang diberikan kepada bangsa dan negara, bahkan dunia. Kontribusinya pun di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan juga kesehatan. Muhammadiyah merupakan organisasi yang menjunjung Islam Indonesia yaitu yang memiliki nilai-nilai ke-Islaman yang berkarakter Indonesia. Berbeda dengan NU yang memiliki konsep “Islam Nusantara”, Muhammadiyah sendiri memiliki konsep yang bertajuk “Islam Berkemajuan”. Konsep ini dicetuskan pertama kali pada Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta pada tahun 2010. Konsep ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah memiliki cita-cita dalam memajukan Indonesia dan mencerdaskan bangsa dengan berlandaskan pada al-Qur’an dan Hadits sehingga dapat tercipta bangsa Indonesia yang berpegang teguh pada

keislaman dan tetap mampu beradaptasi dan bersaing dengan perkembangan zaman (Rohman et al. 2557).

“Islam Berkemajuan” yang digagas Muhammadiyah ini berkomitmen untuk menumbuhkan masyarakat Islam yang modern, berilmu, dan beradab. Gagasan ini fokus pada pengembangan masyarakat Islam melalui pendekatan ilmu pengetahuan, pendidikan, serta amal sosial. “Islam Berkemajuan” memiliki ciri khas utama berupa penekanan pada fungsi akal dan rasionalitas dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Pemikiran ini mengajak umat Islam untuk bersikap terbuka terhadap perkembangan zaman dan tidak hanya berpegang teguh pada warisan tradisi semata. Beberapa nilai yang ada dalam “Islam Berkemajuan” adalah, pertama modernitas, yaitu Muhammadiyah mendorong umatnya untuk aktif mencari dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Hal ini dipandang sebagai sarana penting untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan umat. Kedua, nilai rasionalitas. Hal ini menekankan pentingnya memahami ajaran agama Islam secara mendalam dan menggunakan akal dan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah (dalil naqli), serta argumentasi logis dan rasional (dalil aqli). Ketiga universalisme, yaitu “Islam Berkemajuan” berupaya menginternalisasikan nilai-nilai Islam yang luhur dengan prinsip-prinsip universal yang diakui secara global, seperti keadilan sosial, persamaan hak, dan penghargaan terhadap kemanusiaan. Keempat, keterlibatan global, yaitu pemikiran yang mendorong umat Islam untuk berperan aktif dalam percaturan global, memberikan kontribusi positif dalam berbagai bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan (Nurjannah and Andi Aderus 2025).

Sejak awal pendiriannya, Muhammadiyah tak hanya berfokus pada pengembangan keagamaan saja, Muhammadiyah menekankan pengembangan

pendidikan. Bagi Muhammadiyah, pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa, maka hal tersebutlah yang kemudian menjadi pilar internasionalisasi Muhammadiyah ke kancah global. Istilah Internasionalisasi ini sendiri merupakan sebuah penyebutan untuk tekad Muhammadiyah dalam mencapai cita-cita global. Langkah internasionalisasi ini sudah dilakukan mulai dari kepemimpinan KH. Ahmad Dahlan namun hanya terbatas ke negara-negara tertentu seperti negara di Timur Tengah. Pada tahun-tahun selanjutnya, Muhammadiyah melanjutkan upaya diplomasi internasionalnya melalui berbagai kegiatan, salah satunya Muhammadiyah membeli tanah seluas 10 hektar dan mendirikan sekolah di Melbourne, Australia. Selain dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah juga berkomitmen untuk mengembangkan kebudayaan di dunia internasional sehingga hal ini dapat menjadi bentuk kontribusi Muhammadiyah untuk kemajuan bangsa, agama, dan Muhammadiyah sendiri di kancah global (Hiyyat 2021).

Kiprah internasionalisasi Muhammadiyah sudah mulai tumbuh sejak masa kepemimpinan KH. Ahmad Dahlan, yaitu ketika dilaksanakannya pengurusan bidang haji dan maskapai pelayaran yang mana pada zaman dahulu masih dikelola oleh kolonial. Hal ini dilanjutkan oleh tokoh Muhammadiyah yaitu Fachrudin yang diutus untuk mempelajari tentang pelaksanaan ibadah haji di Saudi Arabia. Selain bidang agama, dikenal juga tokoh-tokoh Muhammadiyah yang handal dalam bidang politik dan dipersiapkan untuk mewakili perjuangan Indonesia di kancah internasional, seperti Prof Agus Salim dan Prof Kahar Muzakir. Pada tahun 2002 tepatnya setelah Muktamar di Jakarta, Muhammadiyah melahirkan lembaga yang mewakilinya di negara-negara internasional yaitu Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah atau disebut dengan PCIM. Cabang pertama yang dilahirkan

adalah PCIM Mesir. Pada saat itu pula Muhammadiyah melalui pimpinannya yaitu Amin Rais dan Syafii Maarif melakukan komunikasi dengan dunia internasional yang mana menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak hanya bergerak di ranah domestik saja namun juga bergerak dalam perkembangan global (Muhammadiyah.or.id, n.d.).

Kiprah Muhammadiyah dalam diplomasi internasional selanjutnya ditunjukkan oleh pemimpin Muhammadiyah yaitu Buya Syafii Maarif yang mana pada tahun 2008 mendapatkan penghargaan *Magsaysay Award 2008* dari pemerintah Filipina dalam kategori *Peace and International Understanding*. Penghargaan tersebut diberikan kepada Buya Syafii sebab keteguhannya dalam membimbing umat Islam dalam menyebarkan toleransi dan pluralisme sebagai basis untuk keadilan dan harmoni di Indonesia bahkan dunia. Selain penghargaan tersebut, berkat ketekunannya dalam merawat pluralisme, Buya Syafii juga menerima berbagai penghargaan lain di Indonesia (umm.ac.id, 2022).

Kiprah Buya Syafii di dunia internasional juga ditunjukkan dengan pengalamannya menjadi Presiden *World Conference on Religion for Peace* (WCRP). Buya Syafii mendapat kesempatan untuk mengajar di *Institute of Islamic Studies Mc.Gill University*, Montreal Kanada (Kemenag.go.id, 2022).

Setelah masa kepemimpinan Buya Syafii, Muhammadiyah kemudian dinahkodai oleh Muhammad Sirajuddin Syamsyuddin atau akrab disapa dengan nama Din Syamsyuddin. Din Syamsuddin menjabat menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah pada periode 2005-2010 dan 2010-2015. Peran Din Syamsuddin dalam membawa Muhammadiyah menuju kancah internasional dicerminkan dengan pemberian beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) kepada anak-anak di Thailand. Muhammadiyah juga

berkontribusi dalam membantu perdamaian di Republik Afrika Tengah, yaitu ketika Kristen dan Islam berseteru dan saling membunuh. Selain itu, Muhammadiyah juga berperan dalam gerakan kemanusiaan di Myanmar, Nigeria, dan Palestina (mediamu.id, 2021).

Lebih lanjut, perjalanan diplomasi Muhammadiyah diteruskan oleh pimpinan Muhammadiyah selanjutnya yaitu Haedar Nashir, yang masih menjabat hingga saat ini. Muhammadiyah pada masa ini telah berupaya untuk melakukan revitalisasi atau penguatan pada lembaga-lembaga Muhammadiyah di luar negeri termasuk penguatan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM), Muhammadiyah juga berupaya menyebarkan konsep atau ide “Islam Berkemajuan” yang telah dirancang melalui pengalihbahasaan buku-buku Muhammadiyah (Temarwut 2023).

BAB 3
ANALISIS UPAYA DIPLOMASI PUBLIK NU
DAN MUHAMMADIYAH PADA TAHUN 2014-2019

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bentuk *soft power*. Ia merupakan negara dengan demokrasi ketiga di dunia, dan menjadi negara dengan penduduk Muslim tertinggi di dunia. Fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim tertinggi menjadi kekuatan atau pengaruh di dunia, terutama bagi dunia Islam. Nilai-nilai Islam Indonesiannya, belakangan ini menjadi perhatian dunia sebab adanya aktivitas atau upaya-upaya diplomasi dari dua organisasi besar yaitu Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah.

Pada bab ketiga ini, penulis membahas mengenai aktivitas atau peran-peran yang dilakukan oleh Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai aktor diplomasi di dunia internasional pada tahun 2014 hingga tahun 2019. Selain itu, penulis akan menganalisis peran-peran diplomasi yang dilakukan NU dan Muhammadiyah menggunakan konsep Strategi Diplomasi Publik untuk Mempromosikan Kebebasan Beragama.

Dalam buku *Shaping the Narrative of Religious Freedom*, Danan (2013) menyatakan bahwa “*discussion about religious freedom can advance the goals of public diplomacy*”. Untuk mencapai tujuan diplomasi publik, terdapat tiga bentuk strategi yaitu membentuk narasi, memperluas dan memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memerangi ekstremisme kekerasan. Berikut peran-peran yang dilakukan NU dan Muhammadiyah dalam melancarkan diplomasi publik pada

tahun 2014 hingga tahun 2019 yang disesuaikan dengan konsep strategi diplomasi publik untuk mempromosikan moderasi beragama.

3.1. Peran NU dalam Diplomasi Publik Tahun 2014-2019

Pada tahun 2014, Nahdhatul Ulama diketuai oleh KH. Said Aqil Siradj yang dimulai pada tahun 2010. Pada periode ini, NU sedang mengupayakan perdamaian Afghanistan yang dimulai pada tahun 2011, berlanjut hingga tahun 2013, kemudian tahun berikutnya Afghanistan sepakat untuk mendirikan Nahdhatul Ulama Afghanistan (NUA) tepatnya pada tanggal 5 Mei 2014. Berdirinya NUA ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan ulama Afghanistan terhadap ajaran Islam yang dicitrakan oleh Nahdhatul Ulama yaitu Islam *Rahmatan lil alamin*. Hingga saat ini, NUA terus berkembang dan telah memiliki cabang di 22 provinsi di Afghanistan (Abdik 2022, 47-50).

Peran NU dalam upaya diplomasi Afghanistan termasuk dalam diplomasi yang berbasis keyakinan yakni agama Islam yang kemudian disebut dengan *faith based-diplomacy*. Afghanistan yang memiliki banyak penduduk Muslim, melihat NU di Indonesia memiliki nilai-nilai yang baik serta gerakan yang dilakukan NU dalam menciptakan perdamaian sangat tepat. Kegiatan diplomasi ini sesuai dengan teori *faith-based diplomacy* dalam buku "*Faith Based Diplomacy Trumping Real Politic*" karena NU menggunakan nilai-nilai agama sebagai bagian dari strategi diplomasi.

Apabila dilihat dari konsep Strategi Diplomasi Publik untuk Mempromosikan Kebebasan Beragama, peran NU dalam diplomasi dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni: membentuk narasi, memperluas dan memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memerangi ekstremisme kekerasan.

3.1.1 Membentuk Narasi

Strategi diplomasi publik yang dilakukan NU dalam mencapai *goal* dari diplomasi publik dan menciptakan perdamaian dilakukan dengan membentuk narasi. Dalam membentuk narasi ini terdapat tiga poin penting yang harus dilakukan sesuai dengan konsep milik Liora Danan dalam buku *Religion and International Relations* yaitu Strategi Diplomasi Publik dalam Mempromosikan Kebebasan Beragama. Pertama, melibatkan suara-suara tak terduga dan kredibel dalam mempromosikan moderasi beragama. Dalam strategi ini, pemerintah dapat menyelenggarakan dialog mengenai moderasi beragama dan isu-isu terkait. Pemerintah dapat bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Narasi yang disuarakan oleh NU adalah narasi Islam *Rahmatan lil alamin*, Islam moderat, dan “Islam Nusantara”. Maka strategi tersebut diwujudkan NU dengan menyelenggarakan ICIS (*International Conference of Islamic Scholars*) di Ponpes Salafiyah- Syafiiyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, pada bulan Maret 2014. ICIS atau *International Conference of Islamic Scholars* adalah forum konferensi kiai/ulama dunia lintas negara yang dipelopori NU bertujuan untuk menampilkan Islam yang *rahmatan lil alamin* serta untuk mempromosikan pemikiran dan nilai-nilai Islam moderat. Prinsip pemikiran ICIS ini adalah mempromosikan pemikiran Islam moderat dan kebangsaan. Sejalan dengan prinsipnya, visi ICIS yaitu mentransformasikan kemuliaan nilai-nilai Islam moderat sebagai pedoman hidup individual dan etika sosial untuk menciptakan tatanan dunia yang damai dan beradab. Di samping visi, ICIS memiliki misi mengaktualisasikan Islam *rahmatan lil alamin*, mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam Aswaja (*Ahlussunah wal jamaah*), mendinamisir ulama dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab, menjembatani para ulama untuk mengembangkan inisiatif

penyelesaian konflik menuju perdamaian, memperkuat jaringan nasional dengan lembaga dan tokoh yang peduli serta mengikatkan diri pada perdamaian (Purwono 2020). Melalui narasi Islam *rahmatan lil 'alamin* yang disampaikan melalui forum ICIS ini, NU berusaha mengajak komunitas muslim internasional untuk bersama-sama membangun perdamaian berdasarkan nilai-nilai agama.

Selanjutnya, narasi Islam *rahmatan lil alamin* yang dibangun NU juga menarik Afghanistan untuk mengadopsi nilai dan citra yang sama. NU telah mengupayakan perdamaian Afghanistan sejak tahun 2011, berlanjut hingga tahun 2013, kemudian di tahun berikutnya, Afghanistan sepakat untuk mendirikan Nahdhatul Ulama Afghanistan (NUA) tepatnya pada tanggal 5 Mei 2014 untuk mengembangkan corak Islam inklusif yang mendorong pada perdamaian. Hingga saat ini, NUA terus berkembang dan telah memiliki cabang di 22 provinsi di Afghanistan (Abdik 2022, 47-50).

Strategi kedua dalam upaya membentuk narasi adalah menggunakan media kreatif untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan terhadap isu moderasi beragama. Media kreatif yang diciptakan NU yaitu NU Online, yang merupakan portal resmi NU yang menyajikan berbagai berita dan artikel. NU juga memiliki majalah seperti Majalah Risalah dan Majalah Suara Nahdhatul Ulama dan publikasi digital. Media kreatif lain yaitu, NU selalu berusaha untuk dapat merambah ke dunia per-filman. Film karya NU berjudul “The Santri (2019)” dan film dokumenter lain yang dapat diakses oleh masyarakat luas. NU belum memiliki media kreatif yang jangkauannya keluar negeri, namun memiliki media NU Online yang dapat dialih bahasakan ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab.

Ketiga, meningkatkan ketersediaan informasi terkait kebebasan atau moderasi beragama. Dalam strategi ini, pemerintah harus mendukung media baik

offline maupun *online*. NU selalu berusaha meningkatkan ketersediaan informasi melalui media *online* maupun *offline*, media *online* yang dimaksud yaitu melalui platform Instagram, X, Youtube, Threads, Spotify, Tik Tok dengan nama pengguna @nahdlatululama dan @nuonline_id, yang mana platform tersebut dapat dialihbahasakan ke bahasa Inggris sehingga dapat dipahami oleh pengguna lain di luar negara Indonesia. Sedangkan dalam media *offline*, NU belum memiliki media cetak yang dapat disebarakan ke lingkup internasional. Hanya saja, NU memiliki media cetak nasional yang diterbitkan oleh PBNU (Pengurus Besar Nahdhatul Ulama) yang dimulai pada tahun 1927 hingga sekarang sudah mencapai edisi 157 (risalahnu.com). Media cetak lainnya yaitu, dikelola oleh Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur yang dijual ke seluruh Indonesia melalui *online market place*. Media tersebut adalah majalah "Aula" yang diresmikan pada tahun 1978 dan masih aktif hingga sekarang. Selain media-media tersebut, NU juga memiliki jurnal sebagai wadah publikasi penelitian yang diberi nama "Nahnu: *Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies*" (ojspalengaan.or.id).

3.1.2 Memperluas dan Memperkuat Kepercayaan Masyarakat

Strategi diplomasi publik NU selanjutnya yaitu memperluas dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan isu moderasi beragama dan perdamaian ke dalam program kunjungan atau pertukaran aktor diplomasi. Salah satu upaya NU dalam mencapai *goal* diplomasi publik dilakukan dengan menggelar konferensi *al-Multaqo as-Sufi al-Alamy* atau *World Sufi Forum* di tahun 2016. Konferensi ini berperan dalam mempromosikan nilai *rahmatan lil alamin* dan mendorong gagasan Islam dalam perdamaian

internasional terutama di dunia Islam. Konferensi ini dimotori oleh lembaga di bawah PBNU yaitu *Jam'iyah Ahlith Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyah* (Jatman). Dalam pertemuan ini dibahas berbagai persoalan dunia dan mencari solusi bersama untuk menciptakan perdamaian dunia berdasar pada nilai-nilai ajaran tasawuf. Kegiatan ini dihadiri oleh Sufi dari berbagai belahan dunia diantaranya, Syaikh Hisyam Kabbani dari Amerika, Syaikh Rojab Dib An-Naqsyabandi dari Syiria, Habib Zaid bin Abdurrahman bin Yahya dari Yaman, dan sufi-sufi lain dari berbagai negara lainnya. Penyelenggaraan konferensi ini juga berkolaborasi dengan Kementerian Pertahanan RI dan dilaksanakan pertama kali pada 15 Januari 2016 serta menghasilkan Sembilan Konsensus Bela Negara. Konferensi kedua, dilaksanakan pada 27-29 Juli 2017 yang membuahkan 15 konsensus. Konferensi ketiga dilaksanakan pada 14-18 Januari 2018, kemudian terselenggara kembali pada 8-10 April 2019 di Pekalongan Jawa Tengah (Purwono 2020).

Lebih lanjut mengenai strategi memperluas dan memperkuat kepercayaan masyarakat, Nahdhatul Ulama juga menggelar agenda internasional yaitu *International Summit of the Moderate Islamic Leaders* (ISOMIL). Agenda ini diselenggarakan di Jakarta pada 9-11 Mei 2016 dan diikuti oleh 300 pemimpin Muslim dari 33 negara dari Timur Tengah, Eropa, Amerika, Australia, Asia, dan ulama-ulama dari Indonesia sendiri. Tujuan dari adanya ISOMIL ini adalah mencari solusi dan memberantas radikalisme Islam di dunia melalui kerja sama internasional. Konferensi ini menghasilkan 16 deklarasi Nahdhatul Ulama yang pokok-pokoknya merupakan hasil diskusi dari para ulama yang hadir dan para ahli yang dilibatkan. Deklarasi tersebut terdapat enam belas poin yang berisi tawaran wawasan dan pengalaman "Islam Nusantara" kepada dunia sebagai paradigma

yang layak dipelajari dan diteladani, bahwa agama berkontribusi kepada peradaban dengan menghargai budaya yang telah ada serta menjunjung tinggi harmoni dan perdamaian (Purwono 2020).

Selain mengadakan konferensi, NU juga berupaya memperluas kepercayaan masyarakat dengan bekerja sama dengan saudara non-Muslim di Vatikan. Pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 14 November 2017, NU melanjutkan diplomasinya dengan bekerja sama dengan *The Community of Sant'Egidio* yang mana komunitas ini adalah sebuah asosiasi umat Katolik yang didedikasikan untuk pelayanan sosial, yang bertempat di Roma, Italia. Kerja sama ini dilakukan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang mana NU diwakili oleh KH Marsudi Syuhud dan pihak *The Community of Sant'Egidio* oleh Marco Impagliazzo. MoU ini berisi mengenai *Interfaith Dialogue, peace and reconciliation, education of young generations, culture of tolerance and togetherness, humanity, and prevention drug abuse*. Dengan ditandatanganinya MoU ini, masyarakat akan memahami bahwa NU tak hanya merangkul masyarakat muslim saja, namun juga merangkul semua kalangan termasuk non-Muslim. NU berkomitmen akan selalu aktif dalam mendorong perdamaian dan terlibat dalam memberikan saran-saran masalah di dunia serta terlibat dalam aksi kemanusiaan di dunia (Azca 2021).

3.1.3 Memerangi Ekstremisme dan Kekerasan

Memerangi ekstremisme dan kekerasan juga merupakan strategi diplomasi publik untuk mempromosikan kebebasan beragama. Hal ini dilakukan oleh NU dengan mengirimkan delegasi ke Rohingya untuk membantu pengungsi Rohingya yang terkena dampak konflik di sana. Pada tahun 2017, NU mengirimkan tim atas bantuan seluruh komponen NU melalui NU Peduli. Tim delegasi NU juga

melakukan koordinasi dengan KBRI di Myanmar (NU Online, 2017).

Selain itu, upaya NU dalam memerangi ekstremisme dan kekerasan dilakukan dengan mengadakan pertemuan trilateral, atau pertemuan tiga negara yaitu Indonesia, Afghanistan, dan Pakistan. Dimana kala itu kedua negara yaitu Afghanistan dan Pakistan marak terjadi ekstremisme dan kekerasan. Pertemuan ini diselenggarakan di Istana Kepresidenan Bogor pada 11 Mei 2018, dihadiri oleh 19 ulama Afghanistan, 17 ulama Pakistan, dan 17 ulama Indonesia. Pertemuan ini menghasilkan sebuah deklarasi yang diberi nama *Bogor Ulama Declaration for Peace* dan deklarasi ini berisi 12 poin penting terkait perdamaian dan resolusi konflik di negara-negara Islam terutama di Afghanistan. Deklarasi ini dibacakan oleh Qibla Ayaz (Pakistan), Quraish Shihab (Indonesia), dan Ataullah Lodin (Afghanistan) (NU Online, 2018).

3.2 Peran Muhammadiyah dalam Diplomasi Publik Tahun 2014-2019

Muhammadiyah adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang tak kalah besarnya dengan NU. Organisasi yang saat ini sudah menginjak abad kedua ini telah melaksanakan Muktamar Muhammadiyah ke 47 pada tahun 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada Muktamar tersebut, pimpinan pusat Muhammadiyah memberi amanat yang salah satunya adalah melaksanakan langkah internasionalisasi peran Muhammadiyah. Maka dari itu, setelah adanya amanat tersebut, langkah Muhammadiyah adalah mendirikan PCIM atau Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah. Pendirian PCIM ini memiliki tujuan sebagai pintu awal Muhammadiyah dalam menyebarkan gagasan dan dakwahnya di dunia internasional. Hingga saat ini, Muhammadiyah telah memiliki 27 PCIM di berbagai negara. Langkah internasionalisasi selanjutnya adalah pendirian amal usaha

Muhammadiyah, dan menjalankan upaya-upaya merespon isu kemanusiaan internasional (Adi Nugroho 2023).

Selanjutnya, peran-peran Muhammadiyah ini akan dipetakan berdasarkan strategi yang dilakukannya. Sesuai konsep “strategi diplomasi publik untuk mempromosikan kebebasan beragama”. Peran Muhammadiyah tersebut dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni: membentuk narasi, memperluas dan memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memerangi ekstremisme kekerasan.

3.2.1 Membentuk Narasi

Strategi diplomasi publik yang dilakukan Muhammadiyah dalam mencapai goal dari diplomasi publik dan menciptakan perdamaian dilakukan dengan membentuk narasi. Dalam membentuk narasi ini terdapat tiga poin penting yang harus dilakukan sesuai dengan konsep milik Liora Danan yaitu strategi diplomasi publik dalam mempromosikan kebebasan beragama.

a. Melibatkan suara-suara tak terduga dan kredibel dalam mempromosikan moderasi beragama. Dalam strategi ini, pemerintah dapat menyelenggarakan dialog mengenai moderasi beragama dan isu-isu terkait. Pemerintah dapat bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Strategi diplomasi publik dengan membangun narasi juga dilakukan Muhammadiyah. Tidak berbeda dengan NU, Muhammadiyah juga menyebarkan narasi Islam *Rahmatan lil alamin* sebagai bagian dari strategi diplomasi mereka, bedanya, Muhammadiyah memiliki narasi keislaman yang dinamakan ”islam berkemajuan”. Narasi-narasi tersebut disebarluaskan melalui seminar dan dialog publik. Salah satunya adalah digelarnya pertemuan para tokoh perdamaian dari berbagai negara yang

disebut *World Peace Forum*. Acara ini diadakan yang kelima kalinya pada tahun 2014 pada bulan November bersamaan dengan perayaan hari jadi Muhammadiyah ke 105 Hijriyah atau ke 102 Masehi. *World Peace Forum* kelima ini bertemakan *Quests for Peace: Lessons of Conflict Resolution*, tema ini dimaksudkan untuk mempelajari resolusi konflik-konflik yang pernah ada baik berhasil maupun gagal agar dapat dipelajari lebih dalam dan dapat menciptakan perdamaian abadi (detiknews, 2014).

b. Strategi kedua dalam upaya membentuk narasi adalah menggunakan media kreatif untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan terhadap isu moderasi beragama. Muhammadiyah selalu meningkatkan ketersediaan informasi melalui media *online* maupun *offline*. Media *online* yang dimiliki Muhammadiyah sangat beragam, sebab Muhammadiyah memiliki berbagai organisasi otonom di bawah naungannya yang juga memiliki media online dengan akun masing-masing. Selain melalui *website*, media yang digunakan oleh Muhammadiyah yaitu media sosial seperti Instagram, Tiktok, X, dengan nama pengguna @lensamu atau @Muhammadiyah yang mana platform-platform tersebut dapat dialihbahasakan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris, maupun Bahasa Arab.

3.2.2 Strategi Muhammadiyah Memperluas dan Memperkuat Kepercayaan Masyarakat

Strategi diplomasi publik Muhammadiyah juga dilakukan dengan memperluas dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Hal ini dapat diupayakan dengan mengintegrasikan isu kebebasan beragama dan perdamaian ke dalam program kunjungan atau pertukaran aktor internasional, pertukaran pendidikan,

profesi, budaya, seminar, dan dialog publik. Pertukaran ini juga melibatkan berbagai kalangan seperti pemimpin agama, ekonom, ilmuwan politik, pembela hak asasi manusia, jurnalis, pemimpin budaya, serta pejabat pemerintah. Upaya untuk memperluas dan memperkuat kepercayaan masyarakat tentang *Islam rahmatan lil alamin* salah satunya dilakukan melalui jalur pendidikan, dimana Muhammadiyah memberikan beasiswa pendidikan kepada siswa Muslim maupun non-Muslim dari Mindanao, Filipina untuk menuntut ilmu di universitas di Indonesia salah satunya adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Langkah ini, menurut Rektor UMY sendiri adalah bentuk aplikasi dari konsep *rahmatan lil alamin* atau kasih sayang bagi alam semesta. Artinya, Islam ini agama yang menyayangi semua makhluk ciptaan Allah SWT dan alam semesta. Islam harus dirasakan manfaat dan kasih sayangnya oleh seluruh umat manusia dan alam semesta tanpa membedakan golongannya, termasuk umat non-Muslim.

Dalam memperkuat kepercayaan masyarakat, Muhammadiyah sering sekali melakukan kegiatan kemanusiaan dan filantropi seperti pengiriman bantuan kesehatan ke Myanmar, membantu Pendidikan di Pattani Thailand, mendirikan klinik kesehatan bersama PCIM Taiwan, pendirian sekolah di Cox's Bazar Bangladesh, Muhammadiyah juga turut serta membantu konflik Palestina dan bencana di berbagai negara melalui lembaga yang didirikannya yaitu *Muhammadiyah Disaster and Management Center (MDMC)* (Hiyyat 2018).

3.2.3 Strategi Muhammadiyah Memerangi Ekstremisme dan Kekerasan

Diplomasi publik dalam mempromosikan perdamaian dan kebebasan beragama dapat dilakukan dengan memerangi ekstremisme dan kekerasan. Aktivitas internasional Muhammadiyah dominan pada kegiatan kemanusiaan,

yang mana aksi kemanusiaan ini termasuk memerangi ekstremisme dan kekerasan, sebab Muhammadiyah membela kaum yang tertindas dengan membantu mereka secara moril maupun materil. Beberapa peran Muhammadiyah dalam aktivitas kemanusiaan di dunia yaitu pada tahun 2014, Muhammadiyah melancarkan diplomasinya dengan mengirimkan bantuan ke Palestina. Muhammadiyah memberikan sumbangan dana bantuan kemanusiaan sebesar 2,5 miliar kepada pemerintah Palestina untuk disalurkan kepada korban perang di Gaza. Selain bantuan dana, Muhammadiyah juga mengirimkan tim medis ke Palestina. Muhammadiyah memang gencar dalam melakukan aksi kemanusiaan, hal ini dibuktikan dengan didirikannya sebuah lembaga di bawah naungan Muhammadiyah yaitu MDMC atau Muhammadiyah *Disaster Management Center*. Aksi kemanusiaan lain yang dilakukan Muhammadiyah adalah pemberian bantuan medis serta mengkoordinasi bantuan pemerintah Indonesia kepada korban bencana di Nepal pada tahun 2015, melalui MDMC, Muhammadiyah juga berkontribusi dalam membantu korban bencana topan Haiyan di Filipina (Rabbani 2018).

Selanjutnya, masih dalam misi kemanusiaan, Muhammadiyah mengirimkan bantuan untuk korban konflik di Rakhine, Myanmar pada bulan September 2017. Dalam misi tersebut Muhammadiyah berfokus pada penanganan darurat saja, utamanya kesehatan. Setelah masa darurat selesai, Muhammadiyah berencana untuk membantu rehabilitasi, rekonstruksi, dan rekonsiliasi (Kompas, 2017). Muhammadiyah bersama Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) juga bekerja sama menjalankan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan pengajaran di Rakhine, Myanmar (Hiyyat 2021).

Pada tahun 2018, Muhammadiyah menjalankan diplomasinya dengan ikut

berupaya dalam mendamaikan konflik yang terjadi pada minoritas Muslim Uyghur Tiongkok. Dalam upaya ini Muhammadiyah mencoba untuk melakukan diskusi dengan tokoh masyarakat, pemerintah, ulama, bahkan dengan Masyarakat Etnis Uyghur (Saidi, 2020).

Aksi-aksi kemanusiaan Muhammadiyah di dunia internasional ini merupakan suatu bentuk internasionalisasi atau diplomasi publik Muhammadiyah yang sesuai dengan teori milik Liora Danan yaitu Strategi Diplomasi publik untuk mempromosikan kebebasan beragama yang dijelaskan dalam buku *Shaping the Narrative of Religious Freedom*, salah satu strategi diplomasinya adalah “*combat violent extremism*” atau memerangi ekstremisme kekerasan. Aksi-aksi yang dilakukan Muhammadiyah terhadap beberapa negara berkonflik seperti dalam Konflik Rohingya di Myanmar, Konflik Muslim Uyghur di Tiongkok dan di Palestina, termasuk aksi memerangi ekstremisme kekerasan, terlihat dari upaya Muhammadiyah dalam membela pihak yang teraniaya melalui berbagai bantuan dan usaha Muhammadiyah dalam mencoba melakukan diskusi dengan pihak terkait untuk menemukan titik terang dan menciptakan perdamaian.

3.3 Perbandingan Peran NU dan Muhammadiyah dalam Diplomasi Publik

NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi yang cukup berpengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah, termasuk dalam agenda-agenda diplomasi dan perdamaian. NU dan Muhammadiyah sering terlibat aktif sebagai mitra pemerintah dalam kegiatan internasional terutama dalam diplomasi publik. Keduanya memiliki persamaan yaitu memiliki peran yang sesuai dengan tiga strategi diplomasi publik yaitu membangun narasi, memperkuat dan memperluas kepercayaan masyarakat, serta memerangi ekstremisme dan kekerasan.

Perbedaan NU dan Muhammadiyah terlihat pada ide dan gagasan-gagasannya, NU berfokus pada gagasan “Islam Nusantara” yang mana memiliki misi dan semangat dalam membangun agama Islam yang berbasis nilai kultural. Sedangkan Muhammadiyah memiliki gagasan “Islam Berkemajuan”, yang mana gagasan ini memiliki semangat dalam membangun kehidupan berkeagamaan yang progresif dan berpendidikan.

Dalam aspek narasi, perbedaan peran NU dan Muhammadiyah ini terlihat dari tema-tema konferensi yang diangkat. NU lebih sering mengangkat tema yang berkaitan dengan inklusivitas dan konten-konten agama contohnya seperti adanya seminar terkait moderasi beragama, sedangkan Muhammadiyah mengangkat tema mengenai penyelesaian konflik. Selain disebarkan melalui konferensi, narasi-narasi Muhammadiyah juga disebarkan melalui langkah-langkah praktis, contohnya Muhammadiyah ini sering melakukan internasionalisasinya dengan berkontribusi dalam penyelesaian konflik, kegiatan kemanusiaan, jadi Muhammadiyah ini lebih menekankan pada fungsi dan teknis lapangan, hal ini dapat mempengaruhi upaya perluasan dan penguatan kepercayaan masyarakat.

Terkait dengan penguatan kepercayaan masyarakat, NU mendapatkan kepercayaan masyarakat dari gagasan dan ide tentang keagamaan yang berorientasi pada toleransi dan inklusivitas, sementara Muhammadiyah memperkuat keyakinan masyarakat dengan menekankan fungsi agama misalnya dengan pemberian beasiswa pendidikan bagi mahasiswa internasional, pengembangan pendidikan seperti pembangunan sekolah di Cox’s Bazar di Bangladesh, misi kemanusiaan (*charity*) seperti adanya pembangunan klinik kesehatan di Taiwan, dan lain sebagainya.

Kemudian dalam strategi penghilangan ekstremisme, secara prinsip NU

dan Muhammadiyah sama-sama mengutuk ekstremisme dan kekerasan sehingga peran yang mereka lakukan yaitu dengan mengunjungi dan memberikan bantuan kepada wilayah atau negara yang berkonflik. NU lebih cenderung membantu dalam perundingan penyelesaian konflik. Sedangkan Muhammadiyah lebih cenderung kepada bantuan kesehatan dan pendidikan. Adanya perbedaan antara NU dan Muhammadiyah tidak menjadikan kedua organisasi ini saling iri dan bermusuhan, namun keduanya saling melengkapi dan berkontribusi untuk agama serta kemajuan Indonesia.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, NU dan Muhammadiyah memiliki andil dalam interaksi internasional dan memiliki peran yang berpengaruh bagi diplomasi Indonesia. Kedua organisasi saling menunjukkan perannya dalam dunia internasional, bahkan misi diplomatik yang dijalankan tak selalu merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah Indonesia, namun murni misi perdamaian kedua organisasi tersendiri. Peran kedua organisasi yaitu NU dan Muhammadiyah sama besar untuk memajukan diplomasi Indonesia di dunia internasional. Peran NU dalam diplomasi Indonesia sudah dimulai sejak kemunculannya sebagai organisasi, yaitu adanya Komite Hijaz, yang mana Komite Hijaz ini adalah upaya NU untuk mengirimkan perwakilannya untuk bertemu dengan penguasa Hijaz. Peran-peran NU dalam diplomasi publik di tahun 2014 hingga 2019 difokuskan pada penyebaran gagasan melalui dialog dan konferensi internasional. Beberapa upaya yang dilakukan NU adalah menyelenggarakan konferensi internasional seperti *International Conference of Islamic Scholar (ICIS)*, *International Summit of the Moderate Leaders (ISOMIL)*, *World Sufi Forum*, dan NU juga turut serta dalam mendamaikan negara yang berkonflik seperti Afghanistan. Untuk memperluas dan memperkuat kepercayaan masyarakat, NU juga mendirikan cabang istimewa di berbagai negara melalui PCINU (Pengurus Cabang Istimewa Nahdhatul Ulama). Muhammadiyah pun menyelenggarakan konferensi, namun tak segencar NU. Muhammadiyah cenderung fokus pada ranah praktis yang mana terlihat dari

keaktifannya membantu negara berkonflik dengan pembangunan infrastruktur serta keaktifannya dalam kegiatan filantropi. Beberapa peran Muhammadiyah yaitu seperti pengiriman bantuan kesehatan ke Myanmar, membantu Pendidikan di Pattani Thailand, mendirikan klinik kesehatan bersama PCIM Taiwan, pendirian sekolah di Cox's Bazar Bangladesh, Muhammadiyah juga turut serta membantu konflik Palestina dan bencana di berbagai negara melalui lembaga yang didirikannya yaitu Muhammadiyah *Disaster and Management Center* (MDMC).

Penulis menyimpulkan bahwa peran NU dan Muhammadiyah ini cukup signifikan dalam menjalankan diplomasi publik dan melancarkan ide-ide perdamaian melalui *soft-power diplomacy*. Hal ini berdampak positif bagi organisasi, bagi Indonesia dan bagi negara-negara yang terlibat. Ide *Islam rahmatan lil alamin* dan “Islam Nusantara” yang disuarakan NU menjadi inspirasi *peacemaking* negara Islam lain bahkan Afghanistan mengadopsi NU di negaranya dengan mendirikan Nahdhatul Ulama Afghanistan. Aktivitas Muhammadiyah juga sangat membantu dan menginspirasi.

Peran kedua organisasi NU dan Muhammadiyah merupakan hubungan simbiosis mutualisme dengan Pemerintah Indonesia dimana NU dan Muhammadiyah telah diuntungkan karena diberikan akses oleh pemerintah Indonesia untuk menyebarkan nilai-nilai dan gagasannya, sementara pemerintah Republik Indonesia juga diuntungkan sebab citra damai dan moderasi Islam Indonesia sebagai identitas nasional dikenal oleh masyarakat internasional. Diplomasi yang diperjuangkan oleh kedua organisasi ini menjadi energi bagi Indonesia yang mampu menguatkan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara di dunia, juga menjadi pintu yang membuka peluang kerja sama

internasional di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan pertahanan keamanan. Kerja sama yang erat dan berkelanjutan akan menciptakan harmoni serta perdamaian di dunia.

Peran-peran NU dan Muhammadiyah ini sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Liora Danan dalam buku yang berjudul “*Shaping the Narrative of Religious Freedom*” yang menjelaskan mengenai strategi diplomasi publik dalam mempromosikan kebebasan beragama, yang mana ada tiga bentuk strategi diplomasi publik yang sesuai dengan peran NU dan Muhammadiyah yaitu membentuk narasi, memperkuat dan memperluas kepercayaan masyarakat, serta memerangi ekstremisme kekerasan.

4.2 Rekomendasi

Dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian berjudul “Peran NU dan Muhammadiyah dalam Diplomasi Publik di Era Joko Widodo pada Tahun 2014-2019”. Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan, keterbatasan sumber data harus menjadi catatan penting bagi peneliti selanjutnya. Selain itu, penelitian ini masih kurang tajam dan mendalam dalam menganalisis isu menggunakan teori maupun konsep yang ada, diharapkan peneliti selanjutnya dapat lebih memahami teori yang digunakan sehingga akan lebih matang dan mendalam analisisnya. Untuk penulis selanjutnya, penulis merekomendasikan untuk tidak membatasi periode terlalu singkat, sebab akan kesulitan dalam proses pengumpulan data. Jika periode tidak terlalu singkat, diharapkan peneliti selanjutnya akan lebih mudah dalam proses pengumpulan data sehingga hasil penelitian akan menjadi lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Abdik, Muhammad Asyrof. “*Analisis Faith-Based Diplomacy Nahdlatul Ulama dalam Konflik Suku Afghanistan (2014-2019)*.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.

Abdullah Masmuh. 2020. “Peran Muhammadiyah Dalam Membangun Peradaban Di Dunia.” *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak* 15 (1): 78–93.
<https://doi.org/10.52049/gemakampus.v15i1.107>.

Faizin, Muhammad Ijmalul. 2020. “Peran Nahdlatul Ulama Dalam Proses Perdamaian Di Afghanistan Pada 2011-2018,” 149.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55578>.

Ferdiyana, Emharis Gigih Pratama &. 2021. “Religion and Public Diplomacy ... 1-12(Pratama & Ferdiyana) | 1 Religion and Public Diplomacy: The Role of Nahdlatul Ulama (NU) in Indonesia-Afghanistan Peace Agenda.” *Jurnal Penelitian* 18 (1): 1–12. <https://doi.org/10.28918/jupe.v18i1.3470>.

Hiyyat, Hafiz Nur. 2021. “Soft Power Diplomacy Indonesia Melalui Muhammadiyah Pendahuluan,” no. October: 0–6.

McDonald, John W. 2012. “The Institute for Multi-Track Diplomacy.” *Journal of Conflictology* 3 (2): 66–70. <https://doi.org/10.7238/joc.v3i2.1629>.

Mujiono, Dadang Ilham, and Siska Alexandra. 2019. *Multi Track Diplomacy: Teori Dan Studi Kasus*.
<https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/5247/MultyTrackDiplomacy.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Nayiroh, Luluatu. 2013. “Pemikiran Dan Aktivitas Dakwah Prof. Dr. K.H Said Aqil Siroj.” *Skripsi*, 1–123.

- Pujayanti, Adirini, and Myanmar Dari. 2018. “*INTERFAITH DIALOGUE soft power DIPLOMASI INDONESIA DALAM ISU ROHINGYA (INTERFAITH DIALOGUE INDONESIAN soft power DIPLOMACY ON ROHINGYA ISSUES)* Majemuk , Sekaligus Negara Terbesar Ketiga Di Dunia , Bagian Dari Solusi Permasalahan Global . 1 Kekuatan Dipl,” 295– 309.
- Purwono, Andi. 2013. “ORGANISASI KEAGAMAAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL: Beberapa Prinsip Dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia.” *Jurnal Politik Profetik* 2 (2): 01–23.
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/951>.
- . 2020. “Diplomasi Kiai Nahdlatul ‘Ulama (NU) Melalui Konferensi Ulama Internasional.” *Sosio Dialektika* 5 (2): 22.
<https://doi.org/10.31942/sd.v5i2.3875>.
- Rohman, Abid, EP Hasanah, Al Rifqi, and Fahma Alhusna. 2557. “ISLAM INDONESIA DAN DIPLOMASI *soft power*” 4 (1): 88–100.
- Temarwut, T. 2023. “Muhammadiyah Dalam Percaturan Internasional.” *Journal on Education* 05 (03): 8930–36.
<https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/1689%0Ahttps://www.jonedu.org/index.php/joe/article/download/1689/1375>.
- Wafi, Mahmud Hibatul. 2019. “Faith Based Diplomacy Nahdlatul Ulama: Diskursus Perdamaian Timur Tengah.” *Thesis*, no. 2: 1–13.

Buku

Azca, Muhammad Najib, dkk. 2019. *Dua Menyemai Damai*. Pusat Studi

Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada.

Johnston, Douglas. 2011. *Faith-Based Diplomacy Trumping Realpolitik*. *Faith-*

Based Diplomacy Trumping Realpolitik. New York: Oxford University

Press, Inc. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195367935.001.0001>.

Makmum, Khariri. 2020. *NU Dan Diplomasi Global*.

Danan, Liora. "Shaping the Narrative of Religion Freedom" Dalam "*Global Public Diplomacy: Religion and Public Diplomacy*", diedit oleh Phillip Seib, 181-202. New York, Palgrave Macmillan, 2013.

Website

Data Indonesia, 2021. "Profil Nahdlatul Ulama". Diakses pada tanggal 10 Januari,

2023. <https://dataindonesia.id/arsip/detail/profil-nahdlatul-ulama>

Gusdurian.net, 2020. "Gagasan Diplomasi Gus Dur dengan Israel" Diakses pada

tanggal 3 Desember 2023. <https://gusdurian.net/2020/07/24/gagasan-diplomasi-gus-dur-dengan-israel/>

Mediaindonesia.com. 2025. "Islam Moderat dalam Kebijakan Politik Luar

Negeri Indonesia." Diakses pada tanggal 5 Mei 2025.

<https://mediaindonesia.com/opini/753353/islam-moderat-dalam-kebijakan-politik-luar-negeri-indonesia>

Muhammadiyah.or.id, 2021. "Internasionalisasi Muhammadiyah Ternyata Telah

Dilakukan Sejak Masa Kiai Ahmad Dahlan" Diakses pada tanggal 3 Oktober

2023. [https://Muhammadiyah.or.id/internasionalisasi-](https://Muhammadiyah.or.id/internasionalisasi-Muhammadiyah-ternyata-telah-dilakukan-sejak-masa-kiai-ahmad-dahlan/)

[Muhammadiyah-](https://Muhammadiyah-ternyata-telah-dilakukan-sejak-masa-kiai-ahmad-dahlan/)

[ternyata-telah-dilakukan-sejak-masa-kiai-ahmad-dahlan/](https://Muhammadiyah-ternyata-telah-dilakukan-sejak-masa-kiai-ahmad-dahlan/)

Tabloiddiplomasi.org, 2018. "Islam Moderat Sebagai Instrumen Diplomasi

Publik” Diakses pada tanggal 17 Desember 2023.

<https://www.tabloiddiplomasi.org/islam-moderat-sebagai-instrumen-diplomasi-publik/>

Umm.ac.id, 29 Mei 2022. “Sederet Penghargaan untuk Buya Syafii Maarif dari Lokal-Internasional” Diakses pada tanggal 3

Oktober 2023. <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/detik-jateng/sederet-penghargaan-untuk-buya-syafii-maarif-dari-lokalinternasional.html>

Kemenag.go.id, 29 Mei 2022. “Buya Syafii Maarif, Pemikir Bangsa Cendekiawan Bersahaja” Diakses pada tanggal 3 Mei 2023.

<https://www.kemenag.go.id/opini/buya-syafii-maarif-pemikir-bangsa-cendekiawan-bersahaja-ay1qwf>

Mediamu.id, 25 April 2021. “Din Syamsuddin: Muhammadiyah Berperan dalam Perdamaian Dunia” Diakses pada tanggal 3 Oktober 2023.

<https://www.mediamu.id/11466/din-syamsuddin-Muhammadiyah-berperan-dalam-perdamaian-dunia/>

NU Online, 12 Mei 2018. “Ini Deklarasi Ulama Indonesia, Pakistan, dan Afghanistan di Bogor” Diakses pada tanggal 20 Maret 2024.

<https://www.nu.or.id/nasional/ini-deklarasi-ulama-indonesia-pakistan-dan-afghanistan-di-bogor-TMcrQ>

detiknews.com, 22 November 2014. “World Peace Forum, Mencari Pelajaran dari Resolusi Konflik” Diakses pada tanggal 20 Maret 2024,

<https://news.detik.com/berita/d-2756205/world-peace-forum-mencari-pelajaran-dari-resolusi-konflik>

Kompas.id, 23 September 2017. “Muhammadiyah Kirim Tim Medis untuk

Pengungsi Rohingya” Diakses pada tanggal 20 Maret 2024,
<https://www.kompas.id/baca/lain-lain/2017/09/23/Muhammadiyah-kirim-tim-medis-untuk-pengungsi-rohingnya>

Ojspalengaan.or.id, “NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies” Diakses pada tanggal 23 September 2024,
<https://ojs.nupalengaan.or.id/NAHNU>

Risalahnu.com, ”Majalah Risalah NU Online” Diakses pada tanggal 23 September 2024, <https://www.risalahnu.com/>